



DPRD Ajukan Tiga Raperda Inisiatif

PUTUSSIBAU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu mengajukan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hak inisiatif DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

Senin (7/11) kemarin, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu menggelar Forum Group Discussion (FGD) dan Public Hearing membahas tiga Raperda inisiatif tersebut di Ruang Sidang Gedung DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Tiga Raperda inisiatif DPRD Kapuas Hulu tersebut yaitu tentang pemberdayaan usaha kakilima (warung), pengembangan ekonomi kreatif dan penanggulangan bencana alam.

Ketua Bapemperda DPRD Kapuas Hulu, M. Zaini menyampaikan bahwa FGD tersebut untuk menyampaikan kajian naskah akademik dari tim akademisi untuk dapat masukan masyarakat, agar bisa dijadikan Raperda Inisiatif dewan. FGD akan menampung

masukan dari masyarakat agar Raperda ini betul-betul memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. "Adanya Perda ini nantinya akan memberi kepastian hukum sesuai semangat otonomi daerah untuk kebijakan yang pro rakyat," kata M. Zaini.

Setelah dibahas bersama draft Raperda inisiatif tersebut akan dilaksanakan pembahasan dan konsultasi untuk kesepakatan bersama, Eksekutif dan Legislatif lewat sidang paripurna. "Tujuan Perda ini adalah mensejahterakan masyarakat Kapuas Hulu," tegas Zaini.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Kuswandi mengatakan bahwa, kegiatan FGD ini adalah implementasi wewenang peraturan perundang-undangan kepada Legislatif untuk membuat raperda inisiatif, lewat Bapemperda, DPRD Kapuas Hulu akan menandatangani tiga Raperda. "Pertama tentang penetapan dan

pemberdayaan kaki lima, dua tentang pengembangan ekonomi kreatif, tiga tentang penanganan tanggungan bencana," papar Kuswandi. Ia juga menegaskan bahwa FGD kali ini punya makna strategis agar substansi Raperda lebih berkeadilan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk itu Legislator Partai Golkar ini mengajak semua pihak yang terlibat dalam FGD bahu-membahu, agar Raperda inisiatif tersebut bisa terwujud dan ditetapkan sebagai Perda. "Kita ingin perda ini terwujud dan jadi aturan yang bermanfaat dan bermartabat," harap Kuswandi. Kuswandi juga berharap apabila tiga Raperda inisiatif tersebut menjadi Perda, OPD terkait segera menindaklanjuti dengan peraturan pelaksana. Peraturan Bupati adalah peraturan pelaksanaannya.

"Selama ini Perda cukup banyak namun ada yang kurang tindak lanjutnya, mari kita jalankan perda ini bersama-sama," ajaknya. (dRe)